Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 4716-4726

Analisis Pidato Perdana Gubernur Lampung Periode 2025–2030 Dalam Kerangka *Good Local Governance*: Sinergi Infrastruktur Dan Ketahanan Pangan

Azis Ahmad[1], Andri Marta[2],
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Indonesia
Corresponding Author: Azis Ahmad, e-mail: azis.ahmad@fisip.unila.ac.id

Published: June, 2025

ABSTRAK

Pemilihan Gubernur Lampung 2024 melahirkan kepemimpinan baru yang dihadapkan pada tantangan krusial seperti kerusakan infrastruktur jalan dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Meskipun tema pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan menjadi bagian dari pidato perdana Gubernur Lampung 2025–2030, masih belum terlihat sejauh mana substansi pidato tersebut mencerminkan integrasi kebijakan yang konkret dan berbasis prinsip *good local governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi pidato perdana Gubernur Lampung dalam kerangka *good local governance*, dengan fokus pada sinergi antara pembangunan infrastruktur jalan dan perlindungan ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi tematik, data dikaji dari pidato perdana gubernur lampung dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Lampung serta didukung data sekunder dari media dan dokumen resmi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat narasi politik yang mengafirmasi integrasi pembangunan infrastruktur jalan dengan ketahanan pangan, pendekatan yang diusung masih bersifat normatif dan belum mengelaborasi mekanisme partisipatif serta sinergi antar-sektor. Dalam perspektif *good local governance*, pidato tersebut belum secara memadai merefleksikan prinsip akuntabilitas dan responsivitas dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya transformasi visi politik ke dalam desain kebijakan yang operasional dan kolaboratif, agar pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik, tetapi juga menjadi fondasi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Kata kunci : Pidato Perdana; Infrastruktur Jalan; Ketahanan Pangan; *Good Local Governance*

ABSTRACT

The 2024 Lampung Gubernatorial Election resulted to a new leadership that is faced with crucial challenges such as road infrastructure damage and threats to food security. Although the themes of infrastructure development and food security are part of the inaugural speech of the Governor of Lampung 2025-2030, it remains to be seen to what extent the substance of the speech reflects concrete policy integration and is based on the principles of *good local governance*. This research aims to analyze the substance of the Lampung Governor's inaugural speech within the framework of *good local governance*, focusing on the synergy between road infrastructure development and food security protection. This research uses a qualitative approach with a thematic content analysis method, the data is studied from the Lampung governor's inaugural speech in the Lampung Provincial DPRD plenary session and supported by secondary data from the media and official documents. The analysis shows that although there is a political narrative that affirms the integration of road infrastructure development with food security, the approach is still normative and has not elaborated on participatory mechanisms and inter-sectoral synergies. From the perspective of good local governance, the speech has not adequately reflected the principles of accountability and responsiveness in strategic decision-making. Therefore, this research emphasizes the importance of transforming political vision into an operational and collaborative policy design, so that infrastructure development is not only a symbol of physical development, but also a foundation for food security and sustainable community welfare in Lampung Province

Keywords: inaugural speech, Road Infrastructure; Food Security; *Good Local Governance*;

PENDAHULUAN

.

Kontestasi Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2024 melahirkan kepemimpinan baru di provinsi ini. Pasangan Rahmad Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela secara resmi dinyatakan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum dengan perolehan suara melebihi 80 %. Fenomena ini menunjukkan legitimasi politik yang kuat dari masyarakat Lampung. Pasangan yang memiliki Visi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas" dengan Misi "mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif, memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif, meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan dan berkelanjutan" (KPU Lampung,2024) ini dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, bersamaan dengan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Kepemimpinan pemerintahan baru di Provinsi Lampung dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan berat, di antaranya angka kemiskinan di atas rata-rata nasional, Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas, lemahnya konektivitas infrastruktur jalan provinsi di desa, serta pembangunan jalan yang tidak terintegrasi dengan saluran drainase serta ancaman alih fungsi lahan pertanian yang berimplikasi terhadap ketahanan pangan daerah (RKPD Prov. Lampung, 2025). Fragmentasi perencanaan pembangunan, lemahnya koordinasi antarsektor, serta belum optimalnya pelibatan pemerintahan desa dalam proses formulasi kebijakan daerah turut memperburuk efektivitas respons kebijakan terhadap masalah-masalah tersebut. Dalam konteks ini, urgensi integrasi antara pembangunan infrastruktur, perlindungan lahan pertanian, dan penguatan sistem ketahanan wilayah menjadi semakin jelas.

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi strategis dalam memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan daerah. Di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Lampung, kondisi infrastruktur dasar, terutama jalan provinsi di desa masih menjadi permasalahan utama yang menghambat mobilitas masyarakat, akses terhadap layanan sosial dasar, serta efisiensi distribusi hasil pertanian. Ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan antara kawasan perkotaan dan pedesaan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperlemah ketahanan pangan lokal dalam arti yang lebih luas. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merancang arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur mampu menopang sektor-sektor vital seperti pertanian dan ketahanan pangan.

Pada Tahun 2023 panjang jalan Provinsi Lampung sepanjang 1.695,479 Km. Kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat sepanjang 361,57 Km dan Kondisi baik serta sedang sepanjang 1.333,87 Km (RKPD, 2025). Secara Rinci, kondisi jalan di Provinsi Lampung dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2019 – 2023

No	Tahun	Panjang Ruas Provinsi (Km)	Kondisi							
			Mantap				Tidak Mantap			
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	2019	1.693,273	1.100,718	65,005	153,709	9,078	84,104	4,967	354,742	20.950
2	2020	1.693,273	1.091,243	64,446	196,398	11,599	239,435	14,140	166,197	9,815
3	2021	1.693,273	882,798	52,136	393,697	23,251	164,725	9,728	252,053	14,886
4	2022	1.693,273	832,659	49,175	468,629	27.676	126,51	7.471	265,475	15.678
5	2023	1.695,479	975,50	57,54	358,37	21,14	78,44	4,63	283,13	16,70

Sumber : Dinas BMBK Provinsi Lampung,2023

Dari Tabel di atas, hingga tahun 2023 terdapat 283,13 KM atau 16 % ruas jalan Provinsi Lampung mengalami rusak berat tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Sebagian besar kerusakan tersebut berada di wilayah pedesaan, yang merupakan pusat produksi pangan dan basis utama aktivitas pertanian masyarakat. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas penduduk dan distribusi hasil pertanian, tetapi juga memperburuk akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar lokal. Ketergantungan masyarakat desa pada infrastruktur jalan yang layak cukup tinggi, terutama dalam konteks rantai pasok pangan dan efisiensi biaya produksi. Oleh karena itu, kerusakan jalan yang berkepanjangan di Provinsi Lampung dapat berdampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi lokal dan ketahanan pangan wilayah.

Sebagai bagian dari tradisi politik lokal, pidato perdana gubernur di hadapan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung menjadi momentum penting untuk mengartikulasikan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta komitmen strategis pemerintah daerah selama masa jabatan 2025–2030 dalam menjawab berbagai permasalahan di atas, termasuk isu krusial terkait Infrastruktur dan ketahan pangan. Pidato Perdana Gubernur tidak hanya merepresentasikan visi politik dan teknokratis kepala daerah, tetapi juga menjadi instrumen komunikasi publik yang memuat narasi tentang legitimasi kekuasaan, orientasi pembangunan wilayah, dan respons terhadap tantangan lokal-global yang kian kompleks. Dalam pidato perdana, seorang yang telah dilantik, baik kepala negara ataupun kepala daerah, bukan hanya menyampaikan pesan/janji berkaitan dengan rencana yang akan tokoh tersebut kerjakan untuk memajukan bangsa / daerahnya. Lebih dari hal tersebut, tokoh tersebut juga akan lebih menekankan bagaimana visi serta misi yang disampaikan tokoh tersebut lakukan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa atau wilayahnya (Angelina dalam Ardhan, 2020). Setiap pidato pelantikan mencerminkan arah kebijakan yang akan diambil dalam lima tahun mendatang, termasuk strategi untuk menghadapi tantangan domestik maupun global (Maryanah, 2025). Oleh karena itu, analisis terhadap pidato perdana gubernur dapat membuka ruang pemahaman mengenai sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good*

local governance) diartikulasikan dalam dokumen politik tersebut, serta bagaimana narasi pembangunan dirumuskan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Meskipun komitmen pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan telah menjadi bagian dari narasi utama dalam pidato perdana Gubernur Lampung, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab realitas di lapangan. Pertama, pembangunan infrastruktur jalan selama ini cenderung bersifat sporadis dan belum terintegrasi dengan kebutuhan fungsional, seperti akses pasar tani dan kawasan produktif. Kedua, belum terlihat adanya pendekatan sinergis antara kebijakan infrastruktur jalan dan ketahanan pangan dari ancaman alih fungsi lahan, padahal keduanya sangat menentukan dalam menjaga ketahanan pangan lokal. Ketiga, arah pembangunan infrastruktur jalan dan ketahanan pangan juga belum sepenuhnya merefleksikan prinsip yang ada dalam *good local governance*, meliputi transparansi, kesetaraan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas yang berbasis kebutuhan lokal.

Prinsip *Good Governance* yang ada di tingkat daerah lebih dikenal dengan *good local Governance.* Prinsip ini memiliki uraian nilai yang sama *Good Governance* seperti transparansi, kesetaraan, partisipasi warga, dan akuntabilitas di antara pemerintah, swasta dan warga di daerah. Dalam penelitian ini, (Suryanto,2008) menyatakan ada 6 strategi yang bisa diimplementasikan dalam *good local Governance* di antaranya :

a) Penyuluhan kebijakan yaitu sosialisasi melalui seminar, penyuluhan, atau pelatihan tentang berbagai kebijakan Pemerintah Republik Indonesia seperti Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP).
b) Kepemimpinan transformatif dan inovatif dan. Menanamkan nilai-nilai dan jiwa kewirausahaan di lingkup pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat.
c) Efektivitas dikaitkan dalam konteks pengelolaan APBD untuk pelayanan pada masyarakat dan swasta yang lebih luas dan pembangunan berkelanjutan.
d) Managemen kinerja, dibuat jelas berdasarkan merit system, mulai perencanaan hingga evaluasi program.
e) Penerapan prinsip *Good Governance*, pelayanan berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
f) Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah daerah sesuai dengan kompetensi yang di.

Selain prinsip di atas, pemerintah daerah juga harus memaksimalkan komunitas-komunitas perkotaan dan pedesaan sebagai wadah dalam mengakomodasikan aspirasi warga yang terdiri dari komunitas pengusaha, komunitas masyarakat, komunitas aktivis, dan komunitas lainnya. Penerapan prinsip pemerintahan yang baik akan berjalan maksimal jika ditunjang oleh pion kokoh dalam prinsip Governance.

Penelitian ini mempertanyakan bagaimana arah dan substansi pidato perdana Gubernur Lampung periode 2025–2030 merefleksikan konsistensi antara visi politik, kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan, dan tantangan ketahanan pangan yang nyata di Provinsi Lampung dalam kerangka *good local governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi pidato perdana Gubernur Lampung periode 2025–2030 dalam kerangka *Good Local Governance*, dengan fokus pada integrasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan ketahanan pangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiono, 2017) dengan tujuan untuk menganalisis substansi pidato perdana Gubernur Lampung periode 2025–2030 dalam kerangka *Good Local Governance*, dengan fokus pada integrasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan ketahanan pangan. Sumber data kunci berasal dari pidato perdana Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 4 Maret 2025. Data sekunder bersumber dari berita media daring serta artikel terkait. Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik. Pendekatan analisis isi tematik dipilih karena mampu mengungkap pola makna, struktur naratif, dan representasi makna yang tersembunyi dalam teks, yang relevan untuk memahami secara mendalam konstruksi sosial dan politik dalam konteks penelitian ini. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (manifest), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi (Eriyanto, 2011). Analisis isi (*content analysis*) dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema utama terkait *good local governance*, sinergi infrastruktur dan ketahanan pangan dan kemudian menginterpretasikannya. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber serta dengan memastikan keterlacakan dan keterkaitan logis antara data mentah dan temuan tematik yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan infrastruktur jalan dan ketahanan pangan adalah salah satu tema yang diangkat oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada Pidato perdana gubernur lampung periode 2025-2030 dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 4 Maret 2025. Pembangunan infrastruktur jalan dan ketahanan pangan adalah tema ke-5 dalam urutan isi pidato dari 9 tema isu yang diangkat. Hal ini menunjukkan bahwa Pembangunan infrastruktur jalan dan ketahanan pangan merupakan salah satu masalah yang menjadi Atensi khusus Gubernur Lampung, sebagaimana kutipan pidato Gubernur Lampung, Rahmad Mirzani Djausal berikut :

"ke depan Prioritas pembangunan infrastruktur harus tetap dilanjutkan infrastruktur jalan kita harus mendukung sektor sosial harus mendukung sektor pertanian dan juga pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan kita ingin meningkatkan kesejahteraan petani kita harus

memberikan petani akses yang lebih baik terhadap teknologi dan pasar produk-produk pertanian di provinsi Lampung harus diberi nilai tambah mulai di desa." (Djausal, 2025)

1. *Good Local Governance* dalam Pidato Perdana Gubernur Lampung

Pidato perdana Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada 4 Maret 2025, menyiratkan upaya artikulatif dalam menegaskan komitmen terhadap prinsip-prinsip *good local governance*. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah (*local governance*), pidato ini semestinya tidak hanya menjadi instrumen komunikasi simbolik, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip *good local governance*, seperti transparansi, kesetaraan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas, serta koordinasi lintas sektor. Dalam pidato perdana, Gubernur menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis pada desa, penguatan akses petani terhadap teknologi dan pasar, serta peningkatan nilai tambah produk lokal. Pernyataan seperti "*produk-produk pertanian di provinsi Lampung harus diberi nilai tambah mulai di desa*" mencerminkan pengakuan terhadap peran aktor lokal sebagai entitas utama dalam pembangunan daerah. Hal ini selaras dengan konsep *good local governance* sebagaimana dipaparkan oleh (Rosika & Frinaldi, 2023) karakteristik atau prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dikembangkan dalam praktik tata kelola yang baik antara lain *Partisipasi* yaitu Setiap warga negara berhak memiliki kesetaraan dalam memilih dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi mereka. yang menekankan pada keterlibatan aktor non-negara, termasuk masyarakat desa, dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan publik.

Substansi pidato menunjukkan upaya untuk membingkai pembangunan infrastruktur tidak hanya sebagai aspek teknokratis, tetapi juga sebagai instrumen penguatan struktur sosial-ekonomi lokal. Namun demikian, jika dianalisis melalui pendekatan *content analysis*, narasi tentang partisipasi aktif masyarakat, organisasi lokal masyarakat masih bersifat normatif dan belum disertai dengan rencana operasional yang konkret. Belum terlihat indikator yang menggambarkan bagaimana mekanisme partisipasi akan dijalankan secara sistematis. Ini menjadi penting karena Salah satu strategi membangun dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (g*ood local governance*) adalah melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan (Kholilah, 2023).

2. Infrastruktur Jalan Sebagai Agenda Strategis Pembangunan Daerah

Pembangunan infrastruktur jalan secara eksplisit menempati posisi sentral dalam pidato perdana Gubernur Lampung periode 2025–2030, dan dikonstruksikan sebagai fondasi utama percepatan pertumbuhan ekonomi lokal di daerah. Jalan disebut sebagai penghubung strategis antara pusat produksi dan distribusi, serta sebagai prasyarat mobilitas sosial-ekonomi masyarakat desa. Rahmad

Mirzani Djausal menegaskan bahwa "infrastruktur jalan kita harus mendukung sektor sosial, harus mendukung sektor pertanian," yang memperlihatkan adanya kesadaran politik terhadap fungsi multifungsi jalan dalam sistem tata kelola pembangunan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan terintegrasi yang menyatakan bahwa pembangunan terintegrasi adalah suatu proses ketika pemerintah daerah telah menyiapkan rencana pembangunan strategis untuk jangka waktu lima tahun (*Patel et al.* dalam Yanti, 2020) . Dalam konteks daerah agraris seperti Lampung, jalan desa menjadi nadi utama penghubung antara pusat produksi (lahan pertanian) dengan pasar, fasilitas sosial, dan simpul logistik yang lebih luas.

Data dari Dinas BMBK Provinsi Lampung (2023) mencatat bahwa 283,13 km atau sekitar 16% dari total jalan provinsi berada dalam kondisi rusak berat, dengan sebaran dominan di wilayah pedesaan. Situasi ini memperkuat berbagai studi yang menyebutkan bahwa kerusakan jalan berdampak langsung terhadap efisiensi distribusi pangan, peningkatan biaya logistik, serta menurunnya daya saing produk pertanian lokal (World Bank, 2020). Berdasar hal tersebut, ketika Gubernur menempatkan infrastruktur jalan sebagai salah satu dari sembilan prioritas dalam pidato perdananya sebagai kepala daerah, hal ini mencerminkan respon yang baik atas persoalan struktural yang selama ini dihadapi masyarakat lampung, yaitu permasalahan produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Secara kritis, belum terdapat rincian dalam pidato tersebut mengenai pendekatan pembangunan jalan yang kontekstual dan partisipatif. Pembangunan infrastruktur jalan selama ini seringkali bersifat linier dan sektoral, tidak terintegrasi dengan sistem drainase, irigasi, dan tata ruang pertanian. Jika fenomena terus dilanjutkan akan berpotensi melahirkan pembangunan yang tidak berkelanjutan serta mengancam stabilitas ekologis dan ketahanan pangan lokal. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah agenda infrastruktur yang dikemukakan dalam pidato tersebut telah mempertimbangkan prinsip keterpaduan pembangunan wilayah dan sensitivitas sosial-ekologis, sebagaimana disarankan dalam pendekatan *territorial governance* "*Multi-level territorial governance has become part of the discourse on European spatial planning and territorial cohesion*". (Faludi 2012).

3. **Ketahanan Pangan dan Integrasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Di tengah dinamika pembangunan daerah dan tekanan multidimensional terhadap sistem agraria, ketahanan pangan muncul sebagai isu strategis yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan wilayah di Provinsi Lampung. Ketahanan pangan menjadi pembahasan krusial dalam pidato perdana Gubernur Lampung, yang secara eksplisit menyatakan komitmen untuk "mendukung sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan." Penegasan ini menandai pengakuan terhadap pentingnya pangan sebagai pilar ketahanan wilayah dan keamanan sosial. Dalam perspektif *food security governance*, ketahanan pangan tidak hanya dimaknai

sebagai ketersediaan pangan secara kuantitatif, tetapi juga menyangkut aksesibilitas, keterjangkauan, serta stabilitas pasokan yang berkelanjutan (FAO, 2013). Dalam konteks Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional, isu ini semakin penting mengingat berbagai ancaman seperti alih fungsi lahan, degradasi infrastruktur pendukung pertanian, dan perubahan iklim yang kian nyata dihadapi para petani di daerah ini.

Kondisi infrastruktur jalan yang rusak di wilayah sentra produksi pangan secara langsung berdampak pada efisiensi rantai pasok dan biaya logistik. Hal ini tidak hanya mengganggu distribusi hasil panen ke pasar, tetapi juga meningkatkan kerugian pascapanen akibat keterlambatan transportasi dan menurunnya kualitas produk. Studi oleh IFPRI (2021) menunjukkan bahwa akses jalan yang buruk merupakan salah satu faktor utama yang memperburuk kerentanan petani kecil terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, integrasi pembangunan infrastruktur jalan dengan sistem pertanian dan perlindungan lahan menjadi prasyarat mutlak dalam memperkuat ketahanan pangan wilayah.

Meskipun ketahanan pangan dan infrastruktur jalan menjadi bagian dari narasi politik dalam pidato perdana Gubernur Lampung, substansi kebijakan yang menghubungkan infrastruktur dengan perlindungan lahan pertanian masih tampak minim dan belum terumuskan secara sistematis. Belum terlihat mekanisme perlindungan terhadap lahan produktif dari konversi menjadi kawasan non-pertanian, padahal Lampung menghadapi tekanan tinggi terhadap alih fungsi lahan, terutama di wilayah pinggiran kota dan desa-desa penyangga. Dalam kerangka *good local governance*, kekosongan ini menunjukkan pentingnya desain kebijakan yang kolaboratif antara stakeholder pemerintah lokal dan kelompok masyarakat dalam merumuskan strategi integrasi ketahanan pangan dengan pembangunan infrastruktur jalan. Diperlukan Setiap pemangku kepentingan harus responsif terhadap permasalahan kompleks yang ada di masyarakat. (Rosika & Frinaldi, 2023). Dengan pendekatan kebijakan ini, pembangunan infrastruktur dapat benar-benar menjadi instrumen penguatan ketahanan pangan di Provinsi Lampung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pidato perdana Gubernur Lampung periode 2025–2030 mengandung artikulasi politik yang penting dalam menyoroti isu pembangunan infrastruktur jalan dan ketahanan pangan, yang secara implisit berupaya menegaskan komitmen terhadap prinsip-prinsip *good local governance* dan penguatan ketahanan wilayah. Narasi gubernur Lampung mengenai pentingnya peningkatan akses petani terhadap teknologi dan pasar, serta integrasi pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, mencerminkan pengakuan terhadap peran partisipasi masyarakat dalam sistem pembangunan daerah dan ketahanan pangan.

Pendekatan analisis isi terhadap pidato perdana Gubernur Lampung periode 2025–2030 menunjukkan bahwa substansi yang disampaikan masih bersifat normatif dan lebih mencerminkan intensi politik daripada strategi kebijakan yang operasional. Meskipun terdapat afirmasi terhadap pentingnya pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pangan, narasi yang muncul belum diikuti oleh rumusan yang sistematis mengenai strategi partisipasi masyarakat, integrasi lintas sektor, maupun instrumen implementasi yang jelas.

Analisis terhadap pidato perdana Gubernur Lampung periode 2025–2030 menunjukkan bahwa meskipun isu pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan disampaikan sebagai agenda strategis, substansinya masih bersifat normatif dan belum dilengkapi dengan kerangka kebijakan yang operasional. Ketiadaan integrasi antara pembangunan infrastruktur jalan dan perlindungan lahan pertanian, serta lemahnya penerapan prinsip *good local governance*, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas aktor, mengindikasikan masih ada jarak antara visi politik dan kebutuhan riil di lapangan. Berdasarkan realita tersebut, dibutuhkan perumusan kebijakan yang lebih konkret, partisipatif, dan kontekstual agar pembangunan infrastruktur benar-benar berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhan, Dhea Tisane. 2020. "Analisis Bahasa Politik Anies Baswedan Dalam Pidato Pengukuhannya Sebagai Gubernur Jakarta Periode 2017-2022." Etnolingua*l* 4(1): 27–42. doi:10.20473/etno.v4i1.17762.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2022). *Kajian efektivitas pembangunan infrastruktur terhadap ketahanan pangan wilayah*. Jakarta: Bappenas.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. (2023). *Laporan kondisi ruas jalan provinsi tahun 2023*. Bandar Lampung: BMBK Provinsi Lampung.

Djausal, Rahmad Mirzani.(2025). *Pidato Perdana Gubernur Lampung 2025-2030 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung*. Bandar Lampung

Eriyanto. (2011). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Jakarta: Kencana.

Faludi, Andreas. 2012. "*Multi-Level (Territorial) Governance: Three Criticisms*." *Planning Theory and Practice* 13(2): 197–211. doi:10.1080/14649357.2012.677578.

FAO. (2013). *The state of food insecurity in the world 2013: The multiple dimensions of food security*. Rome: Food and \iculture Organization of the United Nations.

IFPRI. (2021). *Rural road access and smallholder food security: Evidence from Asia and Sub-Saharan Africa*. Washington, DC: International Food Policy Research Institute.

Kholilah, Ayu. (2023). "*Partisipasi Masyarakat Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan.*" 10(1): 27–40. doi:10.55745/jwbp.v10i1.117.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2025). *Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka Pidato Sambutan Gubernur Lampung Periode 2025 – 2030 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung*. Bandar Lampung : https://www.youtube.com/watch?v=v-TmKKR2tzY

RKPD Provinsi Lampung. (2025). *Rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun 2025*. Bandar Lampung: Bappeda Provinsi Lampung.

Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang*. COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development, 2(09), 1902–1908. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587

Saptono, P. B., & Purwanto, D. (2022). *Analysis of good corporate governance's ineffectiveness in preventing corruption in BUMN*. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 8(1), 77–94. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/870

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryanto,Adi. (2008). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara.

Maryanah, Tabah. 2025. "Analisis Pidato Presiden Prabowo: Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia; Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan." 11: 85–98. https://doi.org/10.25157/moderat.v11i1.4461 Volume 11, Nomor 1, Februari 2025

World Bank. (2020). *Connecting farmers to markets: Rural road investments and agricultural development*. Washington, DC: World Bank Publications.

Yanti, Dewi,dkk. (2024). "*Peran Media Sosial Dalam Mempromosikan Pariwisata Di Desa Perkebunan Bukit Lawang*." Jurnal Pariwisata 11(1): 1–13. doi:10.31294/par.v11i1.21228. 11 Volume 1 Nomor 3 Tahun 2024